

Kontribusi KKN Profesi Mahasiswa dalam Akselerasi Likuidasi Satuan Kerja di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Gorontalo

Contribution of KKN Profesi Students to Accelerating Ministry/Institutional Unit Liquidation at the Regional Treasury Office, Gorontalo

Dwi Ratnasari¹, Andi Subhan², Mochamad Sakir³, Swastiani Dunggio⁴, Gaffar⁵, Syahrir Abdussamad^{6*}

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Ichsan Gorontalo

^{3,4}Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Ichsan Gorontalo

⁵Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

⁶Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: ratnasaridwi628@gmail.com*, as.unisan09@gmail.com, mochamadsakir@gmail.com,
swastianidunggio@yahoo.co.id, agaffar8888@gmail.com, syahrirabdussamad@ung.ac.id*

Article history

Received: 13-11-2025

Accepted: 01-12-2025

Published: 01-12-2025

Abstrak

Perubahan struktural dalam kabinet memicu konsekuensi administrasi dan keuangan yang signifikan, khususnya terkait penyelesaian Satuan Kerja (Satker) yang terdampak likuidasi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dan percepatan proses penyelesaian administrasi keuangan satker tersebut, termasuk penyusunan Laporan Keuangan UAKKBUN. Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat (PPM) melalui KKN Profesi bertujuan memberikan asistensi dan dukungan teknis secara langsung kepada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mengakselerasi proses penyelesaian administrasi keuangan dan likuidasi satker yang terdampak. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) melalui KKN Profesi, di mana mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan rutin, seperti mempedomani pedoman penyusunan Laporan Keuangan UAKKBUN, menghadiri *zoom meeting* terkait *dead-end-unit* (DEU), serta membantu proses pemutakhiran data dan dokumentasi sesuai regulasi terbaru (misalnya PMK 85 Tahun 2024). Hasil dari PPM menunjukkan adanya kontribusi nyata mahasiswa dalam memperkuat kapasitas dan kecepatan Kanwil DJPb Gorontalo. Kehadiran mahasiswa KKN Profesi berhasil mengoptimalkan waktu penyelesaian dokumen, mengurangi beban kerja administrasi pegawai, serta meningkatkan pemahaman tim terkait prosedur likuidasi, yang pada akhirnya mendukung terciptanya tata kelola keuangan negara yang akuntabel

Kata Kunci: Likuidasi Satker; KKN Profesi; Ditjen Perbendaharaan; Tata Kelola Keuangan; Akuntabilitas.

Abstract

Structural changes within the cabinet have generated significant administrative and financial consequences, particularly regarding the settlement of Work Units (Satker) undergoing liquidation. The Regional Office of the Directorate General of Treasury (DJPb) in Gorontalo Province holds a crucial role in ensuring accountability and expediting the completion of the affected satker's financial and administrative processes, including the preparation of the UAKKBUN Financial Report. The Community Service Program (PPM) implemented through the Professional Community Service Program (KKN Profesi) aims to provide direct technical assistance and support to the Regional Office of DJPb Gorontalo in accelerating the financial administration and liquidation processes of the impacted satker. The implementation method employed is Participatory Action Research (PAR) through KKN Profesi, whereby students are actively involved in routine activities such as adhering to the guidelines for preparing the UAKKBUN Financial Report, attending Zoom meetings related to dead-end units (DEU), and assisting with data updating and documentation in accordance with the latest regulations (e.g., Minister of Finance Regulation No. 85 of 2024). The results of the community service program demonstrate a tangible contribution by students in strengthening the capacity and efficiency of the DJPb Gorontalo Regional Office. The involvement of KKN Profesi

students successfully optimized document completion time, reduced the administrative workload of staff, and enhanced the team's understanding of liquidation procedures, ultimately supporting the realization of accountable public financial governance.

Keywords: Satker Liquidation; Professional Community Service Program (KKN Profesi); Directorate General of Treasury; Public Financial Governance; Accountability

1. PENDAHULUAN

Sektor publik, khususnya dalam ranah administrasi keuangan negara, merupakan arena yang sangat dinamis dan sering kali dihadapkan pada perubahan struktural yang cepat. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi kebijakan publik, tetapi juga berimplikasi pada cara pengelolaan dan pelaporan keuangan. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah reorganisasi atau likuidasi Satuan Kerja (Satker) di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), yang sering kali dipicu oleh penataan kabinet baru. Proses likuidasi ini bukanlah sekadar penghapusan entitas, melainkan sebuah tantangan besar yang harus dihadapi oleh semua pihak terkait, terutama dalam hal memastikan kontinuitas dan akuntabilitas pelaporan keuangan [3][12].

Contoh nyata dari tantangan ini dapat dilihat pada kasus-kasus di mana Satker yang dilikuidasi harus menyelesaikan seluruh tanggung jawab keuangannya dalam waktu yang terbatas. Misalnya, jika sebuah Satker di Kementerian X dilikuidasi, mereka harus menyiapkan laporan akhir yang mencakup semua transaksi keuangan yang telah dilakukan selama masa operasionalnya. Proses ini memerlukan ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat. Tanpa adanya pengelolaan yang baik, terdapat risiko besar terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi indikator utama dalam penilaian laporan keuangan pemerintah pusat.

Di tengah situasi ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo berperan sentral sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat wilayah. Tanggung jawab mereka mencakup pembinaan, pengawasan, dan penyusunan laporan keuangan [4]. Oleh karena itu, percepatan penyelesaian administrasi dan likuidasi Satker yang terdampak di wilayahnya menjadi prioritas utama. Penundaan dalam proses ini dapat menghambat opini WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang pada gilirannya dapat memengaruhi reputasi dan kredibilitas pemerintah di mata publik. [1][2][11]

Dalam konteks ini, Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi diinisiasi sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk mendukung efektivitas kinerja pemerintah. Mahasiswa KKN Profesi ditempatkan langsung di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan fokus pada isu akselerasi penyelesaian likuidasi Satker. Mereka diharapkan dapat memberikan nilai tambah melalui dukungan sumber daya manusia dan pengetahuan akademis yang dimiliki. KKN Profesi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengabdian, tetapi juga sebagai jembatan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dan praktik di lapangan.

Melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat memperkuat kapasitas teknis, mempercepat proses administrasi, dan menyediakan “buffer” SDM pada periode beban kerja tinggi. Dengan memberikan dukungan yang diperlukan, mahasiswa akan berperan aktif dalam mengatasi tantangan teknis administrasi, pemutakhiran data, dan kepatuhan terhadap regulasi terbaru. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang cepat, tepat, dan akuntabel, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi masyarakat luas [7][8][13].

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini sangat jelas dan terfokus. Pertama, memberikan asistensi dan dukungan teknis secara langsung kepada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk mempercepat proses penyelesaian administrasi dan pelaporan keuangan Satker yang terdampak likuidasi. Dalam hal ini, mahasiswa akan dilatih untuk memahami dan menerapkan prosedur-prosedur yang berlaku dalam administrasi keuangan, sehingga mampu berkontribusi secara efektif dalam proses likuidasi. Kedua, tujuan lainnya adalah menerapkan pengetahuan akademis mahasiswa di bidang manajemen dan keuangan dalam lingkungan kerja profesional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya belajar teori, tetapi juga dapat mengatasi masalah riil yang dihadapi di sektor publik. Pengalaman ini akan sangat berharga bagi mereka dalam membangun karir di masa depan.

Manfaat dari kegiatan pengabdian ini sangat luas dan signifikan. Bagi Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo, dukungan sumber daya manusia temporer yang diberikan oleh mahasiswa KKN Profesi akan membantu memperlancar proses administrasi. Dengan adanya tambahan tenaga kerja, diharapkan proses penyelesaian likuidasi Satker dapat dipercepat, sehingga tidak menghambat opini WTP terhadap laporan keuangan pemerintah.

Sementara itu, bagi mahasiswa KKN Profesi, kegiatan ini memberikan pengalaman praktis dan profesional yang sangat relevan. Mereka akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme dan tantangan dalam tata kelola keuangan negara. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya wawasan mereka, tetapi juga menyiapkan mereka untuk terjun ke dunia kerja dengan lebih percaya diri dan kompeten.

Dinamika perubahan struktural dalam sektor publik, khususnya di bidang administrasi keuangan negara, menuntut adaptasi dan respons yang cepat dari semua pihak terkait. Reorganisasi dan likuidasi Satker di tengah penataan kabinet baru menciptakan tantangan yang kompleks, yang harus dihadapi oleh Kanwil DJPB Provinsi Gorontalo. Dalam konteks ini, Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengabdian, tetapi juga sebagai jembatan antara teori dan praktik. Melalui dukungan mahasiswa, diharapkan proses administrasi dan pelaporan keuangan dapat dipercepat, sehingga tata kelola keuangan negara dapat berjalan dengan lebih efektif dan akuntabel. Dengan demikian, semua pihak dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.

2. METODE

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi merupakan salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang sangat penting dalam konteks pendidikan tinggi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, KKN Profesi Universitas Ichsan Gorontalo yang dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menawarkan sebuah contoh konkret bagaimana mahasiswa dapat terlibat langsung dalam operasional instansi pemerintah dan memberikan dukungan substantif serta teknis [1][7][8][13].

Kegiatan KKN yang dilaksanakan selama 63 hari, dari 13 Januari hingga 13 Maret 2025, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi dengan berbagai instansi yang telah disetujui. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Lokasi pelaksanaan yang strategis di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, khususnya di Bidang PAPK, memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam proses administrasi pemerintahan, yang sangat relevan dengan bidang studi mereka.

Metode pelaksanaan KKN ini menggunakan pendekatan Partisipatif-Aksi (Participatory Action Research - PAR) [10]. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk berfungsi sebagai fasilitator dan partisipan aktif dalam setiap tahap kegiatan. Proses ini dimulai dengan observasi dan identifikasi masalah awal, di mana mahasiswa melakukan pengamatan mendalam terhadap proses kerja yang ada di instansi. Melalui pengamatan ini, mereka dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pegawai dalam menyusun laporan keuangan. Misalnya, mahasiswa mungkin menemukan bahwa terdapat kesulitan dalam mengakses data yang diperlukan untuk penyusunan laporan, yang kemudian menjadi fokus dalam rencana aksi bersama.

Setelah tahap identifikasi, mahasiswa dan pegawai instansi merumuskan rencana aksi bersama. Dalam tahap ini, kolaborasi sangat penting, karena melibatkan pemikiran kolektif tentang solusi yang mungkin diimplementasikan. Contohnya, jika ditemukan bahwa ada kekurangan dalam pelatihan pegawai mengenai penggunaan perangkat lunak akuntansi, mahasiswa dapat mengusulkan penyelenggaraan workshop untuk meningkatkan keterampilan pegawai. Pelaksanaan aksi dan asistensi menjadi tahap berikutnya, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam proses penyusunan dokumen dan berkas administrasi likuidasi, sekaligus memberikan dukungan teknis dan substantif kepada pegawai.

Tahapan kegiatan KKN ini dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, tahap persiapan melibatkan koordinasi yang intensif antara mahasiswa dan pihak instansi. Pada fase ini, mahasiswa mempelajari berbagai regulasi yang berkaitan dengan likuidasi satuan kerja (Satker) berdasarkan PMK 85 Tahun 2024, serta pedoman penyusunan Laporan Keuangan UAKKBUN. Pemahaman yang

mendalam tentang regulasi ini sangat penting, karena akan mempengaruhi setiap langkah yang diambil selama KKN [4][12].

Kedua, tahap pelaksanaan di mana mahasiswa melakukan asistensi penyusunan dokumen dan berkas administrasi likuidasi. Dalam proses ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teknik penyusunan laporan keuangan, tetapi juga berpartisipasi dalam kegiatan internal instansi, seperti Zoom meeting terkait DEU dan kegiatan GKM. Keterlibatan dalam kegiatan ini memberikan mahasiswa wawasan yang lebih luas tentang dinamika kerja di dalam instansi pemerintah serta tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan.

Ketiga, tahap akhir adalah proses kompilasi data dan hasil capaian serta penyusunan laporan akhir KKN Profesi. Pada tahap ini, mahasiswa menganalisis data yang telah dikumpulkan selama kegiatan dan menyusun laporan yang mencakup temuan, rekomendasi, dan refleksi atas pengalaman yang telah dilalui. Laporan ini tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga merupakan sarana untuk merefleksikan pembelajaran yang telah diperoleh selama KKN.

Secara keseluruhan, KKN Profesi Universitas Ichsan Gorontalo di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menunjukkan bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi secara langsung terhadap pengembangan kapasitas instansi pemerintah. Melalui pendekatan partisipatif, mahasiswa tidak hanya belajar dari pengalaman, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi instansi dengan solusi yang relevan dan aplikatif. Kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintah dalam menciptakan sinergi yang positif untuk pembangunan masyarakat.

Dengan demikian, KKN Profesi ini bukan hanya sekadar kegiatan akademis, tetapi merupakan sebuah langkah strategis dalam membangun keterampilan dan pengalaman mahasiswa, sekaligus memberikan dampak positif bagi instansi dan masyarakat. Pengalaman yang diperoleh selama KKN akan menjadi modal berharga bagi mahasiswa dalam memasuki dunia kerja, serta memperkuat komitmen mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan masyarakat di masa depan. Kegiatan ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang aplikasi nyata dalam kehidupan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Kegiatan KKN Profesi yang dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berfokus pada studi kasus akselerasi penyelesaian satker kementerian/lembaga yang terdampak likuidasi Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Selama 63 hari, mahasiswa terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Membuat *Annual Book*: Proses dan Pentingnya Bagi Organisasi

Seperti diperlihatkan pada gambar 1, kami sedang dalam proses pembuatan *annual book* untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. *Annual book*, atau buku tahunan, merupakan dokumen penting yang merangkum seluruh aktivitas, pencapaian, dan rencana organisasi selama satu tahun. Pembuatan *annual book* biasanya dilakukan di awal tahun dan hanya disusun satu kali dalam setahun, sehingga menjadi catatan yang sangat berharga bagi organisasi [5][11].

Proses pembuatan *annual book* dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai divisi di dalam organisasi. Setiap divisi diharapkan untuk menyampaikan laporan yang mencakup kegiatan yang telah dilakukan, pencapaian yang diraih, serta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun. Misalnya, divisi keuangan mungkin akan melaporkan mengenai pencapaian dalam pengelolaan anggaran, sementara divisi program akan menyampaikan laporan tentang program yang telah dilaksanakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Pengumpulan data ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek organisasi tercakup dalam buku tahunan.



Gambar 1. Membuat *Annual Book*

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah penyusunan dan pengolahan informasi. Dalam tahap ini, tim penyusun harus menganalisis dan merangkum informasi yang telah diterima. Proses ini melibatkan pemilihan informasi yang relevan dan penting, serta penyusunan narasi yang jelas dan mudah dipahami. Misalnya, jika divisi program melaporkan bahwa mereka telah melaksanakan program pelatihan untuk masyarakat, tim penyusun harus menggali lebih dalam tentang jumlah peserta, materi pelatihan, dan dampak yang dihasilkan dari program tersebut. Dengan demikian, annual book tidak hanya menjadi sekadar laporan tahunan, tetapi juga menjadi dokumen yang menggambarkan kontribusi nyata organisasi terhadap masyarakat.

Selanjutnya, pentingnya desain visual dalam *annual book* tidak bisa diabaikan. Penyajian informasi yang menarik dan mudah dibaca akan meningkatkan daya tarik buku tahunan tersebut. Penggunaan grafik, tabel, dan gambar dapat membantu menjelaskan data dengan lebih baik. Selain itu, penggunaan foto-foto kegiatan yang menunjukkan interaksi antara pegawai dan masyarakat juga dapat memberikan kesan positif dan menggambarkan suasana kerja di dalam organisasi.

Setelah semua informasi disusun dan desain visual selesai, tahap akhir adalah pencetakan dan distribusi *annual book*. Buku tahunan ini tidak hanya diperuntukkan bagi internal organisasi, tetapi juga untuk pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat umum. Dengan mendistribusikan *annual book*, organisasi dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta program-program yang telah dilaksanakan. Ini juga menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Dalam konteks pengelolaan organisasi, *annual book* berfungsi sebagai alat evaluasi. Dengan merangkum seluruh aktivitas dan pencapaian dalam satu dokumen, organisasi dapat melihat kembali apa yang telah dilakukan dan mengevaluasi efektivitas program-program yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, *annual book* bukan hanya sekadar laporan, tetapi juga merupakan alat strategis untuk perencanaan ke depan.

Pembuatan *annual book* adalah proses yang kompleks namun sangat penting bagi organisasi. Dari pengumpulan data, penyusunan informasi, hingga desain visual, setiap langkah dalam proses ini memiliki peran yang krusial dalam menciptakan dokumen yang informatif dan menarik. *Annual book* tidak hanya berfungsi sebagai catatan tahunan, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan sarana untuk membangun hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Dengan demikian, *annual book* menjadi bagian integral dari transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta kontribusi nyata terhadap masyarakat. Melalui *annual book*, organisasi dapat menunjukkan dedikasi dan komitmennya dalam mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kegiatan Press Conference APBN

Kegiatan *Press Conference* seperti pada gambar 2, yang diselenggarakan dalam rangka menyampaikan Laporan APBN Lo Hulonthalo (Kinerja Makro-Fiskal Provinsi Gorontalo) untuk periode realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 kepada masyarakat. Kegiatan ini bukan sekedar formalitas, melainkan merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara [5]. Dengan kata lain, *press conference* ini menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap pihak dapat memahami bagaimana anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.



Gambar 2. Kegiatan Press Conference APBN

Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam konteks ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berperan sebagai Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang bertugas untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara. Melalui *press conference* ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui secara langsung bagaimana kinerja makro-fiskal Provinsi Gorontalo selama periode yang telah ditentukan. Hal ini penting karena informasi yang jelas dan terbuka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam kegiatan *press conference* ini, berbagai aspek kinerja anggaran dibahas secara mendalam. Misalnya, para narasumber menjelaskan tentang realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta bagaimana kedua elemen tersebut saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan menggunakan data dan grafik yang jelas, mereka menunjukkan tren pendapatan daerah dari tahun ke tahun, serta bagaimana alokasi anggaran digunakan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Contoh konkret ini memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat tentang bagaimana anggaran mereka dikelola dan digunakan.

Selain itu, *press conference* ini juga menjadi ajang untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali mencerminkan kekhawatiran dan harapan masyarakat terhadap penggunaan anggaran. Misalnya, ada pertanyaan mengenai bagaimana pemerintah berencana mengatasi masalah pengangguran di daerah tersebut. Narasumber dapat menjelaskan program-program yang telah dan akan dilaksanakan, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam program-program tersebut. Proses tanya jawab ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menciptakan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.

Analisis mendalam tentang kinerja makro-fiskal juga disampaikan dalam *press conference* ini. Para narasumber tidak hanya menyajikan angka-angka, tetapi juga memberikan konteks yang lebih luas. Misalnya, mereka membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, seperti investasi, daya beli masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Dengan memberikan analisis yang mendalam, masyarakat dapat memahami tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengelola anggaran dan bagaimana solusi-solusi yang diusulkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut.

Kegiatan *press conference* ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan menyampaikan informasi yang jelas dan akurat,

pemerintah menunjukkan bahwa mereka menghargai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, di mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi pilar utama dalam pengelolaan pemerintahan.

Di akhir kegiatan, kesimpulan yang diambil dari *press conference* ini adalah pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas dan partisipan aktif dalam pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan bahwa melalui kegiatan seperti *press conference* ini, akan tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya pengelolaan anggaran yang baik dan transparan demi kesejahteraan bersama.

Secara keseluruhan, kegiatan *press conference* ini bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan transparansi dan keterbukaan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan berpartisipasi dalam pengelolaan anggaran, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien.

Kegiatan Koordinasi Penyusunan LK.UAKBUN

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan UAKBUN Daerah tahun 2024 yang belum diaudit, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melalui Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengadakan kegiatan koordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait. Seperti pada gambar 3, kegiatan ini mengundang Kepala Seksi Vera dari KPPN Gorontalo beserta stafnya, serta Kepala Seksi VeraKI dari KPPN Marisa beserta staf [11]. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada satuan kerja (satker) mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN yang efektif dan efisien.



Gambar 3. kegiatan koordinasi penyusunan LK. UAKBUN

Pentingnya kegiatan koordinasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Laporan Keuangan merupakan salah satu instrumen vital dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya laporan yang akurat dan transparan, pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan bahwa setiap alokasi dana digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks ini, pemahaman yang baik mengenai penyusunan LK UAKBUN menjadi krusial. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap satker dapat mengidentifikasi dan memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun laporan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Salah satu aspek yang dibahas dalam kegiatan ini adalah tata cara penyusunan laporan keuangan. Dalam praktiknya, penyusunan LK UAKBUN tidak hanya sekedar mengumpulkan data keuangan, tetapi juga melibatkan analisis mendalam terhadap setiap pos anggaran. Misalnya, saat menyusun laporan mengenai belanja daerah, satker perlu mencermati setiap jenis belanja, mulai dari belanja pegawai hingga belanja modal. Setiap pos ini memiliki karakteristik dan aturan yang berbeda, dan oleh karena itu, memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam penyusunannya. Dengan demikian, satker diharapkan dapat menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan daerah yang sebenarnya.

Selain itu, kegiatan koordinasi ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antar satker. Dalam penyusunan LK UAKBUN, seringkali terdapat interdependensi antara satu satker dengan satker lainnya. Misalnya, satker yang mengelola bidang pendidikan harus berkoordinasi dengan satker yang mengelola bidang keuangan untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program pendidikan digunakan secara efektif. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik antar satker menjadi sangat penting. Kegiatan koordinasi ini memberikan wadah bagi satker untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi yang mungkin mereka hadapi dalam proses penyusunan laporan.

Lebih jauh lagi, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami regulasi dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan penyusunan LK UAKBUN. Dengan adanya perubahan regulasi yang sering terjadi, satker perlu selalu memperbarui pengetahuan mereka agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan laporan. Sebagai contoh, jika ada perubahan dalam standar akuntansi pemerintah, satker harus segera menyesuaikan metode penyusunan laporan mereka agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan koordinasi ini menjadi platform untuk mendiskusikan perubahan-perubahan tersebut dan bagaimana cara terbaik untuk mengimplementasikannya.

Dalam sesi tanya jawab, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klarifikasi mengenai hal-hal yang belum dipahami. Ini adalah salah satu cara efektif untuk memastikan bahwa semua peserta memiliki pemahaman yang sama mengenai materi yang dibahas. Misalnya, jika ada satker yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi sumber data yang diperlukan untuk penyusunan laporan, mereka dapat langsung bertanya kepada narasumber yang berpengalaman. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga interaktif, yang memungkinkan setiap peserta untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran.

Kegiatan koordinasi penyusunan LK UAKBUN ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Melalui kolaborasi dan komunikasi yang baik, satker dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses penyusunan laporan, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dengan adanya laporan keuangan yang akurat dan transparan, pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini harus terus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap satker dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mereka dalam penyusunan laporan keuangan.

Kegiatan Fokus Group Discussion (FGD): Strategi dan Implementasi untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan

Kegiatan yang kami ikuti pada gambar 4 adalah sebuah Fokus *Group Discussion* (FGD) yang membahas dua topik penting: Strategi Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disampaikan oleh narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Gorontalo, serta Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia Tahun 2025 yang dipaparkan oleh narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo [7]. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun 2024. Kami merasa terhormat karena berhasil mendapatkan sertifikat dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah DJPB Provinsi Gorontalo sebagai pengakuan atas partisipasi kami.



Gambar 4. Kegiatan FGD

Dalam diskusi ini, kami belajar bahwa untuk mempertahankan opini WTP, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah. Komitmen ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan keuangan. Pimpinan harus mampu menciptakan budaya akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah, di mana setiap pegawai merasa bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dan laporan keuangan. Misalnya, pimpinan dapat mengadakan pelatihan rutin untuk meningkatkan pemahaman pegawai tentang pentingnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selanjutnya, penguatan pengendalian internal menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang efektif dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi. Dalam konteks ini, kami belajar tentang pentingnya audit internal yang dilakukan secara berkala. Audit ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Contohnya, jika ditemukan adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi, audit internal dapat merekomendasikan pelatihan tambahan bagi staf yang bertanggung jawab agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan.

Kepatuhan terhadap regulasi juga merupakan syarat mutlak untuk mempertahankan opini WTP. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur yang ada telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa. Dalam diskusi, kami mendengar tentang contoh daerah yang berhasil meningkatkan kepatuhan regulasi dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan terhadap regulasi. Tim ini juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas, sehingga setiap permasalahan dapat segera ditangani.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam era digital saat ini, penggunaan sistem informasi yang tepat dapat membantu mempermudah proses pelaporan dan pengawasan. Misalnya, implementasi SIPD yang direncanakan untuk tahun 2025 diharapkan dapat mengintegrasikan semua data keuangan dalam satu platform. Dengan adanya sistem ini, pegawai tidak lagi perlu menghabiskan waktu untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, sehingga mereka dapat lebih fokus pada analisis dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam mencapai opini WTP. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan dan pengembangan karir yang berkelanjutan. Dalam FGD, kami mendengar tentang inisiatif pemerintah daerah yang telah berhasil meningkatkan keterampilan pegawai melalui program pelatihan berbasis kompetensi, yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga motivasi pegawai dalam bekerja.

Tindak lanjut cepat terhadap temuan BPK merupakan strategi lain yang sangat penting. Setiap temuan yang dihasilkan oleh BPK harus ditindaklanjuti dengan serius dan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya menerima laporan, tetapi juga berkomitmen untuk melakukan perbaikan. Dalam diskusi, kami mendapatkan contoh dari daerah yang berhasil memperbaiki opini WTP mereka dengan segera menanggapi setiap temuan BPK dan melakukan perbaikan yang diperlukan dalam waktu yang ditentukan.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga tidak kalah penting dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. APIP harus berfungsi sebagai pengawas yang independen dan objektif, memberikan masukan yang konstruktif untuk perbaikan. Dalam FGD, kami mendapatkan pemahaman bahwa APIP yang efektif dapat membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko tersebut.

Kegiatan FGD yang kami ikuti memberikan wawasan yang mendalam tentang strategi dan implementasi yang diperlukan untuk mempertahankan opini WTP dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui komitmen pimpinan, penguatan pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, optimalisasi teknologi informasi, pengelolaan SDM yang baik, tindak lanjut terhadap temuan BPK, dan peran aktif APIP, kami percaya bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan secara signifikan. Sertifikat yang kami terima dari Kementerian Keuangan merupakan pengakuan atas usaha dan komitmen kami dalam mencapai tujuan tersebut. Kami berharap bahwa semua pemangku kepentingan dapat terus bekerja sama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Rapat Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tingkat UAKPA-UAKPAW

Rapat sosialisasi dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2024 yang belum diaudit merupakan momen penting dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di lingkungan kementerian dan lembaga. Dalam rapat ini diperlihatkan pada gambar 5, berbagai aspek terkait penyusunan laporan keuangan dibahas secara mendalam, termasuk ketentuan rekonsiliasi, periodisasi, serta peningkatan kualitas laporan. Hal ini bertujuan agar setiap unit kerja dapat menghasilkan laporan yang tidak hanya akurat, tetapi juga transparan dan akuntabel [11][12].



Gambar 5. Rapat Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan LKKL

Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat adalah pengaturan jadwal rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses penting yang memastikan bahwa catatan keuangan yang dihasilkan oleh setiap unit kerja sesuai dengan catatan yang ada di sistem akuntansi pusat. Dalam konteks ini, pengaturan jadwal rekonsiliasi menjadi krusial agar setiap unit dapat melakukan pengecekan dan penyesuaian data secara tepat waktu. Dengan adanya jadwal yang jelas, diharapkan tidak ada lagi kesalahan yang terjadi akibat ketidaksesuaian data.

Selain itu, rapat juga membahas kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 232/PMK.05/2022. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana laporan keuangan harus disusun, termasuk format, isi, dan waktu penyampaian.

Dalam konteks ini, penting bagi setiap pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan untuk memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Mekanisme penyampaian laporan keuangan secara berjenjang juga menjadi salah satu topik penting dalam rapat ini. Penyampaian laporan keuangan yang berjenjang berarti bahwa setiap unit kerja harus menyerahkan laporan mereka kepada atasan langsung terlebih dahulu sebelum diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap laporan telah melalui proses verifikasi dan validasi yang memadai sebelum sampai ke tangan pengambil keputusan. Dalam praktiknya, hal ini dapat diilustrasikan dengan situasi di mana sebuah lembaga pemerintah memiliki beberapa sub-unit yang mengelola anggaran. Setiap sub-unit harus menyerahkan laporan mereka kepada kepala sub-unit, yang kemudian akan melakukan review dan memberikan masukan sebelum laporan tersebut diteruskan ke kepala unit. Dengan cara ini, diharapkan setiap laporan yang sampai ke tingkat atas telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Pembahasan dalam rapat juga menyoroti pentingnya penyesuaian laporan operasional. Laporan operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang menggambarkan aktivitas dan hasil dari operasi yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga selama periode tertentu. Penyesuaian ini diperlukan untuk mencerminkan kondisi terkini dan memastikan bahwa laporan yang dihasilkan relevan dan akurat. Sebagai contoh, jika terdapat perubahan dalam kebijakan anggaran yang mempengaruhi pengeluaran, maka laporan operasional harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan tersebut. Hal ini penting agar laporan yang disajikan tidak hanya merupakan angka-angka semata, tetapi juga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja lembaga.

Transaksi resiprokal juga mendapat perhatian khusus dalam rapat ini. Transaksi resiprokal adalah transaksi antara dua pihak yang saling memberikan manfaat. Dalam konteks laporan keuangan, penting untuk mencatat transaksi ini dengan benar agar tidak terjadi penggandaan atau penghilangan data. Proses pencatatan yang akurat akan membantu dalam menjaga integritas laporan keuangan dan memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan baik.

Kebijakan pencatatan aset dan anggaran juga menjadi fokus dalam rapat ini. Pencatatan aset yang tepat sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas mengenaikekayaan dan kewajiban kementerian atau lembaga. Aset yang tidak dicatat dengan benar dapat menyebabkan kesalahan dalam laporan keuangan dan mengurangi transparansi. Oleh karena itu, setiap kementerian dan lembaga harus memiliki kebijakan yang jelas mengenai bagaimana aset dicatat dan dilaporkan. Dengan demikian, laporan keuangan akan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesepakatan utama yang dihasilkan dalam rapat ini menegaskan pentingnya validasi data, koordinasi antarunit, serta pengawasan berkelanjutan. Validasi data adalah langkah penting dalam memastikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipercaya. Setiap unit kerja harus melakukan pengecekan berkala terhadap data yang mereka miliki untuk memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi. Selain itu, koordinasi antarunit juga sangat diperlukan agar setiap unit dapat saling mendukung dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Pengawasan berkelanjutan juga menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kementerian dan lembaga. Dengan adanya pengawasan yang ketat, setiap transaksi dan laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini akan membantu dalam mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kementerian dan lembaga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk menjaga integritas laporan keuangan mereka.

Rapat sosialisasi dan pendampingan penyusunan LKKL tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian dan lembaga. Dengan membahas berbagai aspek penting seperti rekonsiliasi, kewajiban penyusunan laporan sesuai PMK, mekanisme penyampaian laporan, penyesuaian laporan operasional, transaksi resiprokal, serta kebijakan pencatatan aset dan anggaran, rapat ini berhasil menghasilkan kesepakatan yang menekankan pentingnya validasi data, koordinasi antarunit, dan pengawasan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan kementerian dan lembaga dapat menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

B. Pembahasan

Hasil kegiatan KKN Profesi menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam proses administrasi dan keuangan satker pemerintah dapat memberikan dampak positif, baik bagi instansi maupun mahasiswa sendiri. Dalam konteks ini, penting untuk menjelaskan secara mendalam bagaimana keterlibatan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga bagi instansi pemerintah yang mereka bantu. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan ilmu teoritis yang telah mereka pelajari di bangku kuliah ke dalam situasi nyata. Misalnya, seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu akuntansi dapat terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, di mana mereka dapat menggunakan pengetahuan tentang prinsip akuntansi dan pengelolaan keuangan untuk membantu instansi dalam menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu.

Lebih jauh lagi, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini juga membantu mereka mengasah keterampilan interpersonal yang sangat penting dalam dunia kerja. Dalam proses berinteraksi dengan berbagai pihak, seperti pegawai instansi pemerintah, masyarakat, dan sesama mahasiswa, mereka belajar untuk berkomunikasi secara efektif, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik. Ini adalah keterampilan yang sangat berharga ketika mereka terjun ke dunia profesional di masa depan.

Selain itu, keterlibatan mahasiswa dalam KKN Profesi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan partisipasi aktif dalam penyusunan laporan keuangan, mahasiswa membantu instansi pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku [9][15]. Hal ini menjadi sangat penting, terutama di era di mana masyarakat semakin menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Ini menjadi pengalaman yang membentuk kesadaran sosial mahasiswa tentang tanggung jawab mereka sebagai calon pemimpin di masa depan.

Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kompleks, seperti likuidasi satker akibat perubahan kebijakan nasional [3][7][13][14]. Dalam situasi tersebut, mahasiswa dapat berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik, membantu instansi pemerintah memahami implikasi dari kebijakan baru dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Kolaborasi semacam ini tidak hanya menguntungkan instansi, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan dunia nyata.

KKN Profesi juga menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk membangun jaringan profesional yang dapat bermanfaat di masa depan. Melalui interaksi dengan pegawai pemerintah dan masyarakat, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga kesempatan untuk membangun relasi yang dapat membantu mereka dalam mencari pekerjaan setelah lulus. Jaringan ini menjadi sangat penting, terutama di era di mana persaingan di dunia kerja semakin ketat.

Di samping manfaat yang diperoleh, mahasiswa juga dihadapkan pada berbagai kendala selama pelaksanaan KKN Profesi. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah adaptasi terhadap lingkungan kerja yang baru. Mahasiswa sering kali harus beradaptasi dengan budaya organisasi yang berbeda dan cara kerja yang mungkin tidak sama dengan yang mereka pelajari di kampus. Untuk mengatasi hal ini, program persiapan KKN yang komprehensif sangat diperlukan. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang etika kerja, manajemen waktu, dan komunikasi efektif, sehingga mahasiswa dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada.

Selain itu, pembagian waktu antara kegiatan akademik dan KKN juga menjadi tantangan tersendiri. Mahasiswa sering kali harus mengatur waktu mereka dengan baik agar tidak mengganggu studi mereka. Monitoring yang berkelanjutan dari pihak perguruan tinggi dan instansi pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat menjalani KKN dengan baik tanpa mengorbankan aspek akademis mereka. Dengan adanya dukungan yang memadai, mahasiswa akan lebih mampu mengatasi kendala-kendala tersebut dan memaksimalkan pengalaman mereka selama KKN.

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan KKN Profesi tidak hanya memberikan dampak positif bagi instansi pemerintah, tetapi juga bagi pengembangan diri mahasiswa itu sendiri. Melalui aplikasi ilmu yang diperoleh, pengembangan keterampilan interpersonal, dan kontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas, mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, instansi pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang ada. Dengan adanya program persiapan yang baik dan dukungan yang berkelanjutan, mahasiswa akan mampu mengatasi kendala yang dihadapi dan

memaksimalkan potensi mereka selama KKN. Pengalaman ini, pada gilirannya, akan membentuk generasi pemimpin yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan KKN Profesi di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berhasil memberikan kontribusi nyata dalam percepatan penyelesaian administrasi dan keuangan satker yang terdampak likuidasi Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Mahasiswa tidak hanya menerapkan ilmu teoritis, tetapi juga berperan aktif dalam pemecahan masalah, sosialisasi regulasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Proses ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam instansi pemerintah dapat menjadi solusi strategis dalam menghadapi tantangan kebijakan publik dan memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah. Saran untuk pengembangan kegiatan KKN Profesi di masa mendatang adalah memperkuat jaringan kerja antara mahasiswa, masyarakat, dan instansi pemerintah, serta menyelenggarakan program persiapan KKN yang lebih komprehensif agar mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan di lapangan; penting pula dilakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan selama pelaksanaan KKN dengan umpan balik dari dosen pembimbing dan instansi terkait, serta mengintegrasikan pengalaman KKN ke dalam kurikulum untuk meningkatkan relevansi teori dengan praktik; selain itu, mahasiswa didorong untuk meningkatkan dokumentasi kegiatan agar menjadi sumber belajar berharga bagi generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Akmal, M., & Darmawan, A. (2024). Penguatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi dan Keuangan*.
- [2]. Astuti, P., & Nugroho, S. (2023). Pendampingan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kas Negara melalui Pembinaan Aplikasi SAKTI di Lingkungan KPPN. *Jurnal Komunitas Mitra Pengelola Keuangan*.
- [3]. Budi, S., & Lestari, H. (2022). Peran Mahasiswa KKN Tematik dalam Sosialisasi Kebijakan Keuangan Daerah Pasca Revisi PP Nomor 12 Tahun 2019. *Jurnal Abdimas Era Baru*.
- [4]. Dwi, A., & Cahyo, E. (2024). Asistensi Teknis Penggunaan Aplikasi Laporan Keuangan UAKKBUN untuk Peningkatan Akuntabilitas Kanwil DJPb. *Jurnal Implementasi Sektor Publik*.
- [5]. Fahri, R., & Santoso, Y. (2023). Optimalisasi Tata Kelola Anggaran Berbasis Kinerja Melalui Pelatihan di Satuan Kerja K/L Wilayah III. *Jurnal Daya Saing Ilmu Manajemen*.
- [6]. Hasan, I., & Nurhayati, T. (2022). Dukungan KKN Profesi terhadap Mitigasi Risiko Administrasi Keuangan di Instansi Pemerintah X. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kontemporer*.
- [7]. Kurniawan, J., & Wulandari, R. (2024). Sinergi KKN Profesi dan BPKP dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Kolaborasi Publik*.
- [8]. Lestari, A., & Pramono, E. (2023). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Instansi Pemerintah melalui Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Audit. *Jurnal Vokasi Ilmu Terapan*.
- [9]. Ningsih, S., & Wijaya, B. (2022). Peran Mahasiswa Akuntansi dalam Mendukung Percepatan Deadline Laporan Keuangan Instansi Vertikal. *Jurnal Abdimas Pelayanan Publik*.
- [10]. Pradana, A., & Dewanti, C. (2024). Implementasi *Participatory Action Research* (PAR) dalam Penyelesaian Masalah Teknis Anggaran di Kantor Vertikal Kementerian Keuangan. *Jurnal Pengabdian Riset Terapan*.
- [11]. Rahmat, H., & Utomo, F. (2023). Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPKTW) untuk Kanwil K/L di Provinsi Banten. *Jurnal Akuntabilitas Publik Daerah*.
- [12]. Sari, M., & Hidayat, A. (2022). Edukasi Regulasi PMK Terbaru tentang Pengelolaan Aset Negara untuk Peningkatan Kepatuhan Satker. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Kebijakan*.
- [13]. Septian, B., & Fitriani, D. (2024). Dukungan KKN dalam Pengelolaan Data Satker Pasca Reorganisasi Instansi Pemerintah. *Jurnal Komunikasi Pengabdian Terstruktur*.
- [14]. Widodo, P., & Susanti, G. (2023). Pengaruh Program Magang terhadap Peningkatan Efisiensi Tugas Administrasi Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*.

- [15]. Yusup, R., & Amelia, K. (2022). Model KKN Profesi untuk Peningkatan Kapasitas SDM dalam Penyelesaian Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran. *Jurnal Wirausaha dan Pengabdian*.